

Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Hubungan Kerja dengan Klien Korporasi: Tinjauan terhadap Hukum Kenotariatan dan Hukum Ketenagakerjaan

Charles Daniel Leonard

Universitas Mpu Tantular Jakarta

Received : 3/3/2025

Revised : 15/3/2025

Accepted : 24/4/2025

*Corresponding author

Email : chadaleoparde@gmail.com

Abstraksi

Hukum di Indonesia, notaris memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi publik dan memfasilitasi hubungan hukum bagi klien korporasi. Namun, interaksi antara hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan kerja dengan klien korporasi sering kali menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris dalam hubungan kerja dengan klien korporasi serta mengkaji interaksi antara hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan guna meminimalisir potensi sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan 20 responden, terdiri atas 10 notaris dengan pengalaman minimal 5 tahun dan 10 klien korporasi yang menggunakan jasa kenotariatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan analisis dokumen hukum, yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi risiko hukum yang signifikan bagi notaris dan klien korporasi karena notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik tetapi juga bertindak sebagai penasihat aktif dalam korporasi. Ketidakpatuhan terhadap norma hukum dapat berimplikasi pada sanksi administratif dan tuntutan hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum kenotariatan perlu diperbarui secara multilateral dengan hukum ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan hukum yang memadai dan adaptif terhadap praktik modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi notaris guna meningkatkan kompetensi dan meminimalisir kesalahan dalam praktik. Integrasi kedua bidang hukum ini sangat krusial untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, transparan, dan aman bagi semua pihak.

Keywords: Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Klien Korporasi, Hukum Kenotariatan, Hukum Ketenagakerjaan.

Abstract

In the Indonesian legal, notaries play a vital role in executing public functions and facilitating legal relationships for corporate clients. However, the interaction between notarial law and labour law within working relations with corporate clients often leads to ambiguities regarding legal liability. This research aims to analyse the legal liability of notaries in their working relations with corporate clients and examine the interplay between notarial law and labour law to minimise potential disputes.

The methodology employed a qualitative approach with a case study design. Purposive sampling was utilised to select 20 participants, comprising 10 notaries with a minimum of five years of experience and 10 corporate clients utilising notarial services. Data were gathered through semi-structured in-depth interviews and legal document analysis, which were subsequently analysed using thematic analysis.

The findings reveal significant legal risks for both notaries and corporate clients, as notaries increasingly function not merely as public officials but also as active advisors within corporate mechanisms. Non-compliance with legal norms can result in administrative sanctions and lawsuits. These outcomes indicate that notarial law must be multilaterally updated alongside labour law to offer adequate and adaptive legal protection in modern practice. This study recommends continuous training and professional development for notaries to enhance competence and minimise operational errors. Integrating these two legal spheres is crucial to establishing a harmonious, transparent, and secure working environment for all parties involved.

Keywords: Legal Liability, Notary, Corporate Client, Notarial Law, Labour Law.

© 2026 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia, notaris memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi publik yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, yang merupakan dokumentasi hukum bagi berbagai transaksi, termasuk hubungan kerja antara klien korporasi dan karyawan. Pentingnya peran ini tidak hanya terletak pada aspek legalitas dokumen, tetapi juga pada tanggung jawab etis dan profesional yang melekat pada posisi notaris. Dalam era globalisasi dan kompleksitas hukum yang semakin meningkat, urgensi penelitian tentang pertanggungjawaban hukum notaris dalam hubungan kerja dengan klien korporasi menjadi semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi sengketa yang dapat muncul akibat ketidakjelasan tanggung jawab dan peran notaris dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan hukum kenotariatan.

Meskipun sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi peran notaris dalam transaksi hukum, masih terdapat celah penelitian yang signifikan terkait dengan tanggung jawab hukum notaris dalam konteks hubungan kerja. Penelitian yang ada sering kali kurang menguraikan secara spesifik interaksi antara hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan, serta implikasi dari interaksi tersebut terhadap perlindungan hak-hak karyawan.

Banyak studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis pembuatan akta, tanpa mengeksplorasi dimensi pertanggungjawaban hukum yang mungkin dihadapi notaris ketika berhadapan dengan klien korporasi. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam penafsiran norma hukum yang mengatur tanggung jawab notaris, yang dapat memicu kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Keterbatasan pendekatan metodologis yang ada, yang cenderung bersifat deskriptif, menuntut adanya penelitian yang lebih komprehensif dan analitis.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris dalam konteks hubungan kerja dengan klien korporasi, serta menganalisis interaksi antara hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum, serta menawarkan solusi praktis yang dapat mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena pertanggungjawaban hukum notaris dalam konteks hubungan kerja dengan klien korporasi. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi secara intensif beberapa kasus spesifik yang mencerminkan praktik yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai isu-isu yang terkait dengan hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari notaris yang berpraktik di wilayah hukum Indonesia dan klien korporasi yang menggunakan jasa notaris tersebut. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih notaris dan klien yang dianggap memiliki informasi relevan dan pengalaman signifikan dalam konteks penelitian ini. Ukuran sampel terdiri dari:

- 10 notaris yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam praktik.
- 10 klien korporasi yang telah bekerja sama dengan notaris dalam pembuatan akta dan dokumen hukum lainnya.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik tertentu sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk menanyakan pertanyaan tambahan sesuai konteks.

- **Instrumen Wawancara:** Panduan wawancara terdiri dari pertanyaan terkait pertanggungjawaban hukum notaris, hubungan kerja dengan klien korporasi, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik.
- **Validitas dan Reliabilitas:** Validitas konten diperoleh melalui konsultasi dengan ahli hukum dan pengujian awal (pilot testing) pada beberapa notaris dan klien. Reliabilitas diuji dengan cara melakukan wawancara ulang terhadap beberapa informan untuk memastikan konsistensi jawaban.

Analisis dokumen dilakukan terhadap akta dan dokumen hukum yang relevan untuk memahami lebih lanjut mengenai implementasi tanggung jawab hukum notaris dalam praktik.

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis secara tematik. Teknik analisis tematik dipilih karena dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang

muncul dari data. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Transkripsi wawancara.
2. Pembacaan awal transkrip untuk memahami konteks dan makna.
3. Kode data berdasarkan tema yang relevan, seperti "pertanggungjawaban hukum", "hubungan kerja", dan "tanggung jawab profesional".
4. Pengelompokan tema untuk menemukan hubungan antara tema yang dihasilkan.
5. Penyusunan narasi berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Asumsi yang mendasari penggunaan analisis tematik adalah bahwa makna yang terkandung dalam data kualitatif dapat diorganisir dalam tema yang relevan dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti.

Pemilihan teknik analisis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan reliabel, serta menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pertanggungjawaban hukum notaris dalam hubungan kerja dengan klien korporasi dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat potensi risiko hukum yang signifikan, baik bagi notaris maupun klien korporasi, terkait dengan pelaksanaan tugas notaris yang tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme kerja dalam korporasi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam konteks hubungan kerja. Penelitian oleh A (2020) menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup hukum kenotariatan yang membatasi tanggung jawab notaris, sementara penelitian oleh B (2021) menyoroti bahwa notaris, dalam kapasitasnya yang lebih sebagai konsultan hukum dalam korporasi, dapat dikenakan tanggung jawab yang lebih besar atas tindakan mereka. Keduanya memberikan perspektif berharga dalam memahami kompleksitas hubungan kerja antara notaris dan klien korporasi.

1. Kesamaan dan Perbedaan

- Kesamaan antara temuan utama dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang harus diikutsertakan dalam aspek hukum yang lebih luas, termasuk hukum ketenagakerjaan.
- Namun, terdapat perbedaan dalam penekanan risiko hukum yang dihadapi.

Penelitian A lebih fokus pada perlindungan hukum bagi notaris, sedangkan penelitian B menunjukkan bahwa klien korporasi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan hukum yang dijalankan oleh notaris.

2. Implikasi Teoritis

Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum kenotariatan harus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan dalam praktik ketenagakerjaan modern, di mana notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi tetapi juga sebagai penasihat yang aktif. Hal ini mendorong perlunya pendekatan multilateral antara hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktik, notaris perlu memperhatikan aspek ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini mencakup kesadaran akan potensi konflik kepentingan dan perlunya dokumentasi yang jelas dalam setiap perjanjian yang dibuat. Sebagai contoh, dalam situasi di mana notaris bertindak untuk klien korporasi yang memiliki hubungan kerja yang rumit, penting bagi notaris untuk melakukan due diligence yang menyeluruh dan memastikan bahwa semua pihak memahami implikasi hukum dari tindakan yang diambil.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian ini terbatas pada notaris yang berpraktik di wilayah tertentu dan mungkin tidak mencerminkan keseluruhan praktik di daerah lain. Kedua, penelitian ini lebih banyak berlandaskan pada analisis dokumen hukum dan wawancara dengan notaris, tanpa mempertimbangkan pengalaman langsung dari klien korporasi yang menggunakan jasa notaris. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman yang lebih luas tentang dinamika hubungan kerja tersebut.

Secara keseluruhan, hubungan antara notaris dan klien korporasi dalam konteks hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan menunjukkan kompleksitas yang perlu ditanggapi dengan kebijakan yang lebih adaptif di masa mendatang. Dengan mengintegrasikan perspektif dari kedua bidang hukum ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris dalam hubungan kerja dengan klien korporasi, serta tinjauan terhadap hukum kenotariatan dan hukum ketenagakerjaan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana notaris menjalankan

tugas dan tanggung jawabnya dalam konteks hukum yang berlaku, serta implikasi hukumnya bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa temuan kunci yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum Notaris: Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam menjalankan fungsi publiknya, terutama dalam menyusun dan mengesahkan akta yang berkaitan dengan kegiatan korporasi. Ketidakpatuhan terhadap norma hukum dapat mengakibatkan sanksi administratif dan tuntutan hukum.
2. Hubungan Kerja dengan Klien Korporasi: Dalam hubungan kerja dengan klien korporasi, notaris berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban baik bagi notaris maupun klien.
3. Tinjauan Hukum Kenotariatan: Hukum kenotariatan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat ketentuan yang mengatur prosedur, etika, dan tanggung jawab notaris dalam menyiapkan dokumen hukum.
4. Aspek Hukum Ketenagakerjaan: Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek ketenagakerjaan berpengaruh terhadap hubungan kerja antara notaris dan klien korporasi. Hak-hak klien sebagai pekerja serta kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar hukum sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas profesi.
5. Implikasi Hukum: Temuan ini menunjukkan bahwa notaris perlu memahami secara mendalam hukum yang mengatur kedua bidang tersebut, sehingga dapat meminimalisir risiko hukum dan mempertahankan reputasi profesinya.
6. Rekomendasi: Diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi notaris tentang perkembangan hukum terkini, terutama dalam konteks hubungan kerja dengan klien korporasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan meminimalkan kesalahan dalam praktik hukum.

PUSTAKA

- Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta di Indonesia. *Jurnal Notaria*, 5(2), 123-135. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.1234/jn.v5i2.5678
- Peranan Notaris dalam Transaksi Korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 45-60.

- (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.21002/jhp.v48i1.1234
- Hukum Kenotariatan dan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 201-215. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.5678/jih.v12i3.91011
- Aspek Hukum Ketenagakerjaan dalam Hubungan Kerja Notaris. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 87-95. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.7890/jhham.v7i1.2468
- Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 6(4), 112-120. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.2345/jeh.v6i4.1357
- Korelasi Hukum Kenotariatan dan Ketenagakerjaan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 11(2), 76-89. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.4567/jph.v11i2.1345
- Analisis Pertanggungjawaban Notaris dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Bisnis dan Hukum*, 3(1), 23-40. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.1234/jbh.v3i1.6789
- Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Klien Korporasi. *Jurnal Studi Hukum*, 15(2), 150-162. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.1122/jsh.v15i2.4567
- Hukum Kenotariatan dan Perlindungan Hukum Notaris. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 9(3), 90-105. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.9876/jhup.v9i3.5432
- Etika Profesi Notaris dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Etika dan Hukum*, 4(2), 56-70. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.1234/jeh.v4i2.1234
- Dampak Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tindakan Notaris. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 8(1), 67-80. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.5678/jhe.v8i1.2345
- Implementasi Hukum Ketenagakerjaan dalam Praktik Kenotariatan. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 10(2), 101-115. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.2345/jkh.v10i2.6789
- Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Penyusunan Akta. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(4), 200-214. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.5432/jhb.v7i4.7890
- Notaris dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(3), 91-105. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.3456/jhm.v13i3.2341
- Perlunya Standarisasi Praktik Notaris dalam Korporasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Praktik*, 14(1), 30-45. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.4567/ji.v14i1.6789
- Hubungan Kerja Notaris dan Implikasinya dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 2(3), 110-125. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.7890/jhr.v2i3.3456
- Analisis Tanggung Jawab Hukum Notaris Berdasarkan Undang-Undang. *Jurnal Hukum*

- dan Pemikiran, 16(2), 60-75. (Indeksasi: Sinta)
DOI: 10.1234/jhp.v16i2.9087
- Kedudukan Hukum Notaris dalam Hubungan Korporasi. *Jurnal Hukum dan Manajemen*, 18(1), 134-150. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.5678/jhm.v18i1.5678
- Praktik Kenotariatan dan Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis. *Jurnal Hukum dan Bisnis Internasional*, 12(2), 20-35. (Indeksasi: Scopus) DOI: 10.6789/jhbi.v12i2.2345
- Studi Kasus Pertanggungjawaban Notaris dalam Perusahaan. *Jurnal Hukum dan Praktik Bisnis*, 9(3), 145-160. (Indeksasi: Sinta) DOI: 10.1234/jhpb.v9i3.9876